



Analisis Kebijakan Kementerian Agama dalam Peningkatan Mutu Pengajaran di Pesantren: Studi di Pesantren Salafiyah dan Modern

Policy Analysis of the Ministry of Religion in Improving the Quality of Teaching in Islamic Boarding Schools: A Study of Salafiyah and Modern Islamic Boarding School

Fachirotu Mina

Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah Dan Ilmu keguruan, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email : fachirotumina@gmail.com

Article Info

Received : 04-01-2025

Revised : 05-01-2025

Accepted : 07-01-2025

Published : 11-01-2025

Abstract

Indonesia is the largest Muslim country in the world. Seeing this great potential, it is interesting to research, whether the value of entrepreneurship in pesantren in Indonesia is not small, in 2022 there is a potential number of pesantren reaching 36 thousand with 17 million students (santri). Pesantren will be solid if supported by a strong economy, quality human resources, and good collaboration. With this research, referring to the collaboration or policy analysis of the Ministry of Religion the Republic of Indonesia whether there is already a partisanship to the independence of pesantren, there has also been an effort to implement entrepreneurship in pesantren. This research method, using in-depth literature study techniques, examines related references, current journals, articles, books, and fact-deepening. The result in this study is that there are many policies of the Ministry of Religion to support the development of pesantren independence and there is a strengthening of entrepreneurship. Although not yet thorough, the process towards it all already looks to continue to grow. Apparently, there is a roadmap of the Ministry of Religion starting from 2021 to 2024 on pesantren independence.

Keywords : ministry of religion, entrepreneurship, pesantren

Abstrak

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Melihat potensi besar tersebut, menarik apabila menelaah, adakah nilai kewirausahaan di lembaga pesantren di Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit, di tahun 2022 terdapat potensi jumlah pesantren yang mencapai 36 ribu dengan 17 juta santri. Pesantren akan kokoh jika ditopang dengan ekonomi yang kuat, sumber daya manusia berkualitas, dan kolaborasi yang bagus. Dengan penelitian ini, mengacu kepada kolaborasi atau analisis kebijakan Kemenag RI apakah sudah ada keberpihakan kepada kemandirian pesantren, sudah ada juga kah upaya mengimplementasikan kewirausahaan di pesantren. Metode penelitian ini, dengan menggunakan teknik studi literatur yang mendalam, menelaah referensi terkait, jurnal terkini, artikel, buku, dan pendalaman fakta. Hasil dalam penelitian ini adalah terdapat banyak kebijakan Kemenag RI mendukung berkembangnya kemandirian pesantren dan ada penguatan kewirausahaan. Meski belum menyeluruh, proses menuju itu semua sudah terlihat untuk terus berkembang. Terlihat, terdapat roadmap Kemenag mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2024 tentang kemandirian pesantren.

Kata Kunci : kementerian agama, kewirausahaan, pesantren



PENDAHULUAN

Manajemen dakwah di Indonesia atau di seluruh dunia era saat ini, terdapat tantangan yang sangat luar biasa. Entah dalam hal pendidikan, metode dakwah, kondisi internal, dan eksternal, hingga terkait ekonomi atau kemandirian lembaga. Terutama di lembaga pondok pesantren di Indonesia. Semisal dalam hal pendidikan, atau pun dunia dakwah saat ini, memiliki tuntutan yang sangat besar dalam mewujudkan generasi yang berkarakter Islami (mulia). Berbagai isu yang ada, mengenai pendidikan karakter, realita saat ini menggambarkan semakin derasnya degradasi moral bangsa di masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain, karena banyak lembaga sekolah di Indonesia hanya sebatas memindahkan ilmu pengetahuan saja, dan belum sampai pada level pembentukan moral dan etika (*character building*). (Syafe'i, 2017). Sehingga, pembentukan karakter harus dilakukan secara konsisten, sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan yang melibatkan aspek nilai *knowledge*, nilai *feeling*, nilai *loving*, dan nilai *action* (Afifah & Mashuri, 2019; Herdiana, 2013). Sehingga akhirnya pembelajaran tidak bersifat parsial saja, akan tetapi sangat perlu diupayakan hal baru pembelajaran yang integratif serta komprehensif dalam membentuk karakter Islami. (Sukma, 2015; Budiyantri dkk., 2016).

Sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia, lembaga pesantren memiliki tantangan yang tidak sepele, baik dari kalangan internal ummat Islam sendiri maupun pihak luar / eksternal. Di era reformasi dan serba digitalisasi ini, tantangan tersebut semakin kuat, ketika kran demokrasi dibuka selebar-lebarnya. Pesantren menjadi lahan subur oleh oknum, pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Dengan, keadaan inilah yang membuat banyak pesantren yang kehilangan kemandiriannya. (Solichin, M. M. 2012)

Terdapat data tulisan dari Wibowo Prasetyo, Staf Khusus Menteri Agama yang pernah terbit di Republika. Terkait pendapat Ki Hajar Dewantara yang seandainya tidak ada kaum santri pesantren yang konsisten melawan para penjajah di Indonesia. Maka, semangat bela negara, dan nasionalisme bangsa Indonesia tidak akan sebesar dan sehebat saat ini. Fakta seperti ini diungkapkan karena selama beberapa dekade, ada beberapa pihak tertentu yang sengaja mengerdilkan peran kaum santri dalam memerdekakan bangsa, mempertahankan kemerdekaan, maupun dalam mengisi kemerdekaan. Ada upaya untuk menyingkirkan kaum santri dari kesadaran publik rakyat Indonesia, dimulai dari menghilangkan peran santri dari catatan-catatan sejarah, lalu membuat opini bahwa santri adalah kalangan terbelakang yang menghambat kemajuan. Padahal, jika mau terbuka melihat fakta di lapangan, di setiap lini kehidupan bangsa ini, selalu menemukan orang-orang berprestasi yang merupakan produk didikan pesantren. Mulai dari Presiden, Menteri, anggota DPR/MPR, pengusaha, dan lain sebagainya. Setelah sekian lama, akhirnya pemerintah mengakui peran santri sehingga tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri. (Hidayat, Mohammad Arief dan Sadat, Anwar. 2021)

Melihat sejarah seperti itu dan kejadian yang terjadi belakangan ini. Seakan cukup timpang pandangan terhadap pesantren. Apalagi, cukup mengkhawatirkan ketika banyak yang memandang pesantren hanya urusan ritual keagamaan saja. Oleh karena itu. Penelitian ini tujuan salah satunya adalah untuk memahami dan menyelaraskan dengan kebijakan atau pun visi Menteri Agama yang tertuang dalam Program Kemandirian Pesantren yakni terwujudnya pesantren yang memiliki



sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan sehingga dapat menjalankan fungsi bidang Pendidikan, bidang Dakwah, dan yang paling terakhir adalah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dengan optimal. Salah satu metode manajemen dakwahnya adalah dengan memahami dan mengamalkan nilai kewirausahaan, tentang ekonomi, kemandirian secara pribadi, maupun lembaga khususnya pesantren di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Motode penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori-teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang telah ditemukan, yakni mengerucut kepada “Analisis Kebijakan Kementrian Agama RI Terkait Impelementasi Program Kewirausahaan di Pesantren Indonesia.” Menurut Creswell, John. W. (2014; 40) menyatakan studi literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen terakit fakta lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan. Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi literatur. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. (Habsy, B. A, 2017) Data yang diperoleh dari dokumen atau artikel jurnal terkait, data dari website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, buku, serta sumber lainnya yang dapat membantu ketersediaan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian ini, terbagi menjadi 4 bagian hasil dan pembahasan. Pertama yang membahas mengenai: Tentang pesantren di Indonesia, kepedulian kebijakan Kementrian Agama RI Terhadap Pesantren di Indonesia, implementasi kebijakan Kemenag RI terkait nilai - nilai kewirausahaan. Dan yang terakhir, yang ketiga membahas mengenai harapan / memupuk optimisme Pesantren di Indonesia. Berikut penjelasannya:

Pesantren di Indonesia

Pesantren adalah tempat di mana santri belajar ilmu agama sekaligus mempelajari ilmu ilmu umum. Dengan dua nilai yang ditawarkan itulah, pesantren mampu menjadi benteng terakhir umat Islam dalam memupuk moral bangsa ini. Niscaya kurikulum Islam akan menjadi kiblat di dunia pendidikan, terutama di Indonesia yang kelak akan mencetak generasi yang hebat, tangguh dan berakhlakul karimah. Nurcholis Majdid berpendapat bahwa secara historis pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman tetapi juga makna nusantara, keaslian Indonesia. Dalam nilai-nilai ilmu kepesantrenan untuk menciptakan keteraturan hidup perlu penataan rencana dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Sehingga, dapat tercipta keteraturan hidup. (Prakoso, D. D., 2021).



Melihat itu semua, tentu terdapat tantangan tunggal pondok pesantren Indonesia di masa modern saat ini adalah terdapat beberapa gesekan globalisasi atau tantangan yang bersifat sangat kompleks. Dalam menghadapi tantangan zaman seperti ini, pesantren juga harus senantiasa memegang prinsip-prinsip pembaharuan yaitu: mampu memiliki kebijaksanaan menurut ajaran Islam, memiliki kebebasan yang terpimpin, berkemampuan mengatur diri sendiri, memiliki rasa kebersamaan yang tinggi, menghormati orangtua dan guru, cinta kepada ilmu, mandiri, kesederhanaan. (Aksara Azhari, 2014)

Kepedulian Kebijakan Kemenag RI Terhadap Pesantren di Indonesia

Bentuk keseriusan Kemenag RI untuk menguatkan kemandirian pesantren terus dilakukan dari waktu ke waktu. Salah satunya, sering mengadakan pemberdayaan ekonomi atau pelatihan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pesantren. (Khoeron, Moh. 2021) Sasaran akhir dari pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren adalah kemandirian pesantren. (Rizal Muttaqin, 2016)

Pondok pesantren selama ini teruji kokoh, kuat, dan selalu bertahan secara kemandirian ekonomi. Akan tetapi, belum banyak pihak yang mampu merealisasikan bisnis model yang ekspansif dan menilai saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mendongkrak semua potensi yang ada di pesantren Indonesia, karena ada beberapa momentum yang perlu disambut dengan sungguh-sungguh. Pertama, momentum adanya Undang-Undang Pesantren. Munculnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren adalah poin penting untuk menjadikan pesantren sebagai lembaga profesional, berkualitas, terutama dari aspek pengelolaan dan pemberdayaan. Kedua, terdapat momentum yang menarik yaitu terjadinya Merger Bank Syariah (3 bank syariah nasional yang berhasil merger menjadi BSI / Bank Syariah Indonesia) yang capaian saat ini termasuk dalam peringkat tujuh perbankan nasional dengan aset 240 triliun dan top 10 perbankan syariah dunia dalam kapitalisasi market. BSI telah memproyeksikan 53,83 triliun penyaluran UMKM atau 23 persen dari total penyaluran dana. Ketiga, terdapat momentum pandemi Covid-19 dan momentum dunia yang serba digitalisasi. (Khoeron, Moh. 2021)

Salah satu implementasi dari kebijakan Kemenag RI, juga pernah menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan tentang pemberdayaan ekonomi umat berbasis tokoh agama. Acara tersebut diikuti oleh 100 orang peserta dari kalangan tokoh agama di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tujuannya untuk mendorong para tokoh agama berperan dalam kegiatan kewirausahaan dan penguatan ekonomi umat. Pesantren memiliki potensi yang sangat besar berkaitan di ekonomi yang bermanfaat bagi umat Islam dan masyarakat luas. Pemberdayaan ekonomi pesantren, dapat dilakukan dengan cara memberikan memperoleh dukungan pelatihan, pendampingan mendalam, inkubasi bisnis, dan dukungan sangat teknis semisal dalam hal pemasaran serta sampai kepada akses permodalan. Bisnis yang dijalankan oleh pesantren atau tokoh agama perlu menyesuaikan dengan potensi dan segmentasi pasar. Kewirausahaan pesantren sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mulai dari menciptakan lapangan kerja baru yang potensial, berpeluang meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan nilai tambah barang dan jasa, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat, serta terciptanya ekonomi umat yang



kokoh dan kemandirian. Pemberdayaan ekonomi umat perlu dikembangkan agar dapat menciptakan santri yang ahli agama dan bisnis. Islam di Indonesia disebarkan oleh ulama saudagar. Nabi Muhammad pun seorang pebisnis handal. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi umat harus mendapat perhatian besar. (Hidayat, Mohammad Arief dan Sadat, Anwar. 2021)

Terkait implementasi kebijakan Kemenag RI kembali. Pada hari Santri tahun lalu, 2021 mengambil tema “Santri Siaga Jiwa Raga”. Peluncuran tema dan logo Hari Santri 2021 yang dilakukan Gus Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas ini, sebagai bentuk simbol pernyataan sikap santri Indonesia agar selalu siap siaga, totalitas menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia. Siaga Jiwa Raga juga merupakan komitmen seumur hidup santri yang lahir dari sifat santun, rendah hati, pengalaman, dan tempaan diri di pesantren. Meskipun Hari Santri sudah ditetapkan, namun masih ada yang memandang santri dengan sebelah mata. Seolah para santri hanya orang-orang yang dibutuhkan dalam urusan memimpin doa dan mengurus pemakaman. Padahal banyak sekali lulusan pesantren yang kuliah di perguruan-perguruan tinggi negeri, bahkan hingga ke luar negeri. Banyak di antara para santri belajar kedokteran, matematika, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Peran santri dan pesantren juga sangat besar di dunia pendidikan. Ketika saat itu negara belum bisa menyediakan dan memfasilitasi pendidikan untuk semua rakyat, ketika negara masih harus berjuang mempertahankan negara yang baru berdiri, ketika negara masih harus menata diri, ada puluhan ribu pesantren di seluruh pelosok nusantara yang mendidik jutaan rakyat Indonesia.

Maka dengan melihat itu semua, afirmasi dan perhatian serius dari Presiden Joko Widodo terhadap pesantren yang ditunjukkan dengan penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri, harus diapresiasi setinggi-tingginya dan dioptimalkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, disahkannya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren semakin menegaskan pengakuan dan kepedulian negara terhadap pesantren. Bahkan kini, Presiden Jokowi juga telah menandatangani Perpres No. 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang di dalamnya terdapat poin mengenai Dana Abadi Pesantren. Perpres ini tentu akan sangat membantu pelaksanaan amanat UU No. 18/2019, yang menyebutkan tiga fungsi pesantren yaitu, fungsi sebagai pendidikan, sebagai dakwah, dan sebagai pemberdayaan masyarakat.

Meski Kemenag RI bukan kementerian agama islam saja, tapi kementerian semua agama resmi yang ada di Indonesia. Tetap memberikan kebijakan secara adil kepada mayoritas dan minoritas agama di Indonesia. Termasuk pesantren, sebagai institusi Kemenag RI yang secara langsung berurusan dengan pesantren juga telah menyusun kebijakan kemandirian pesantren. Kebijakan yang dibuat Kemenag RI ini juga, pasti mempertimbangkan dari fungsi pesantren di masyarakat, serta melimpahnya sumber daya manusia (SDM) pesantren. Sesuai dengan karakteristik pesantren dan fungsinya, kebijakan ini juga menekankan nilai-nilai inklusivitas, fasilitatif, kolaboratif, serta transparansi. Kemenag RI juga menunjukkan keseriusan terhadap pesantren, dengan menetapkan roadmap atau Peta Jalan Kemandirian Pesantren ke depan itu bagaimana? Untuk saat ini, telah dibuat konsep atau timeline mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2024 kedepan. Tahun 2021 ada peluncuran program Pesantrenpreneur, pengembangan Dashboard Data Ekonomi Pesantren, serta piloting program Kemandirian Pesantren untuk 100 pesantren.



Selanjutnya pada 2022 akan ada peluncuran program menarik 100 Badan Usaha Milik Pesantren (BUM-Pes), Santripreneur, Platform Digital Ekonomi Pesantren, yang dilanjutkan dengan replikasi program kemandirian di 500 pesantren. Pada Tahun 2023, akan ada peluncuran Community Economic Hub, yang dilanjutkan dengan replikasi kemandirian pesantren di 1.500 titik pesantren di Indonesia. Lalu pada 2024, akan dilakukan replikasi serupa di banyak pesantren lainnya. Program ini juga sejalan dengan gagasan Presiden Jokowi “Membangun Indonesia Dari Pinggiran.” (Prasetyo, Wibowo, 2021)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kebijakan Kementerian Agama RI terkait implemmentasi program kewirausahaan di Pesantren Indonesia yang telah tersaji di atas. Terdapat beberapa kesimpulan bahwa terdapat banyak kebijakan dan implementasi Kementerian Agama RI untuk mendukung kemandirian pesantren dengan memberikan nilai program kewirausahaan di Pesantren Indonesia: pertama, fokus kepada beberapa kebijakan yang sudah memiliki keberpihakan kepada pesantren di Indonesia terutama dalam hal kemandirian, ekonomi, dan kewirausahaan pesantren. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya beberapa kebijakan tentang keberpihakan pesantren seperti adanya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Keppres Nomor 22 Tahun 2015, disahkannya UU No. 18 Tahun 2019, Presiden Jokowi juga telah menandatangani Perpres No. 82/2021, dan terdapat roadmap atau Peta Jalan Kemandirian Pesantren oleh Kemenag dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Kedua, terdapat beberapa implementasi kebijakan yang telah dibuat Kementerian Agama RI untuk menuju kemandirian pesantren. Diantaranya adalah Kementerian Agama bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersama PT Bukalapak MoU dalam Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Digital Terintegrasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berbasis Pesantren; Kemenag mengadakan Peningkatan Kapasitas UMKM Pesantren Berbasis Digital di Bogor; Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan tentang pemberdayaan ekonomi umat berbasis tokoh agama. Acara tersebut diikuti oleh 100 orang peserta dari kalangan tokoh agama di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah; Menteri Agama jalin sinergi dengan Menteri Perindustrian dalam usaha penumbuhan dan pengembangan wirausaha mandiri di lingkungan Pesantren. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan MoU untuk mendukung program kemandirian pesantren; Di Lombok Utara Kementerian Agama melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah melakukan penandatanganan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten Lombok Utara untuk pengembangan kompetensi wirausaha, pengembangan keprofesionalitas berkelanjutan, dan penciptaan usaha mandiri di madrasah; Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menyelenggarakan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Bidang Agrobisnis Pondok Pesantren Angkatan IV dan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Bidang Kewirausahaan Pondok Pesantren Angkatan V secara tatap muka; Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan dan Kewirausahaan diadakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afifah, A., & Mashuri, I. (2019). “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Karakter Pada Siswa (Studi Multi Kasus Di Sdi Raudlatul Jannah Sidoarjo Dan SDIT Ghilmani Surabaya)”. *Tarbiyatuna: Kajian Pendidikan Islam*, 3(2), 97–111.
- Aksara Azhari, “Eksistensi Sistem Pesantren Salafi Dalam Menghadapi Era Modern.” *Islamic Studies Journal*, 2 (1), Januari –Juni 2014: 14.
- Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto. 2022. “Teken MoU dengan PBNU, Menkop-UKM Ingin Cetak Wirausaha Baru Lewat Pesantren”, <https://wartaekonomi.co.id/read394086/teken-mou-dengan-pbnu-menkop-ukm-ingin-cetak-wirausaha-baru-lewat-pesantren>, diakses 3 April 2022, pukul 22:05 WIB.
- Bank Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). *Roadmap Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren*. Jakarta (ID): Bank Indonesia.
- Dipo. 2021. “Kaban: Pondok Pesantren Bidang Kewirausahaan dan Agrobisnis Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/kaban-pondok-pesantren-bidang-kewirausahaan-dan-agrobisnis-dapat-meningkatkan-kesejahteraan-umat>, diakses pada 4 April 2022, pukul 11:43 WIB.
- Habsy, B. A. (2017). “Seni memahami penelitian kuliitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur.” *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90-100.
- Halim A., dkk. (2015). *Majamen Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Hidayat, Mohammad Arief dan Sadat, Anwar. 2021. “Kemenag: Pesantren Miliki Potensi Ekonomi yang Sangat Besar”, https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1415596-kemenag-pesantren-miliki-potensi-ekonomi-yang-sangat-besar?page=all&utm_medium=all-page, diakses pada 3 April 2022 pukul 12.14 WIB.
- Irawan, Edi. 2019. “Pola Pengembangan Kemandirian Kewirausahaan Pondok Pesantren Berbasis Santri (Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat)” dalam *Jurnal Ekonomi an Bisnis Islam* Vol. 4, Nomor 1 (halaman 16-21). Sumbawa: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa.